

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

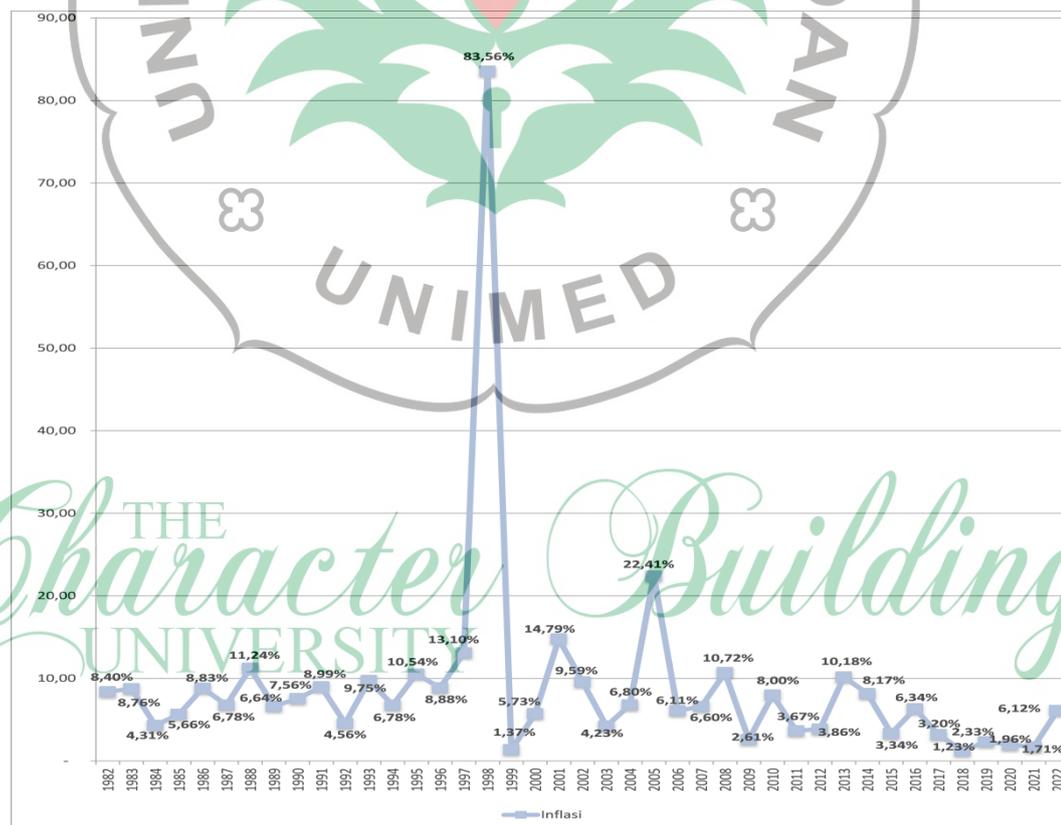
Perkembangan perekonomian dalam suatu negara dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang penting bagi suatu negara, khususnya negara berkembang. Inflasi digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian. Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja dan menabung. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali, perekonomian menjadi kacau dan lesu.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023) inflasi adalah suatu fenomena ekonomi, di mana terjadi kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan.

Dampak negatif dari inflasi yang terjadi di Indonesia terjadi pada saat krisis ekonomi yang melanda pada akhir Agustus tahun 1997-1998 ditandai dengan terjadinya stagnan dalam perekonomian, karena sektor riil tidak dapat menjalankan proses produksi dengan baik. Keadaan lain yang terjadi adalah suku bunga yang tinggi dan bahkan pernah mencapai 70% dan inflasi tinggi 80%.

Krisis ini dipicu oleh terdepresiasi nilai tukar rupiah dengan tajam yang berdampak pada perekonomian. Krisis ekonomi yang terjadi mengakibatkan perekonomian menjadi bermasalah dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan berdampak pada lonjakan angka inflasi nasional.

Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, juga mempunyai permasalahan inflasi. Berikut ini akan dijelaskan perkembangan tingkat inflasi Sumatera Utara dari tahun 1982-2022 menurut data dari BPS Sumatera Utara.



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Gambar 1.1 Tingkat Inflasi Sumatera Utara Tahun 1982-2022 (%)

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa inflasi di Sumatera Utara tahun 1982-2022 cenderung mengalami kondisi naik turun (fluktuatif). Berfluktuasi

menggambarkan perkembangan kondisi yang kurang stabil. Inflasi di Sumatera Utara pada tahun 1997 mencapai 13,10% yang disebabkan oleh krisis moneter. Tahun 1998 tingkat inflasi mencapai pada tingkat tertinggi yakni 83,56% yang termasuk kedalam penggolongan inflasi berat, tahun 1998 merupakan tahun yang paling parah. Hal ini disebabkan oleh krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Inflasi tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu terdepresinya nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, peningkatan permintaan dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya seiring dengan kebijakan-kebijakan stabilisasi yang dilakukan secara nasional, misalnya pengetatan jumlah uang beredar (*tight money politic*), menurunkan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia), maka inflasi Sumatera Utara turun drastis dari 83,56% pada tahun 1998 menjadi 1,37% (Laporan Perekonomian, 1998).

Pada tahun 2001 inflasi mengalami kenaikan yang terbilang tinggi, tingkat inflasi tahun 2001 lebih tinggi dari inflasi rata-rata yang disebabkan masih terasanya pengaruh krisis moneter 1998. Pada tahun 2002 dan 2003 inflasi mengalami penurunan yaitu berada di bawah 10% (Laporan Perekonomian, 2001).

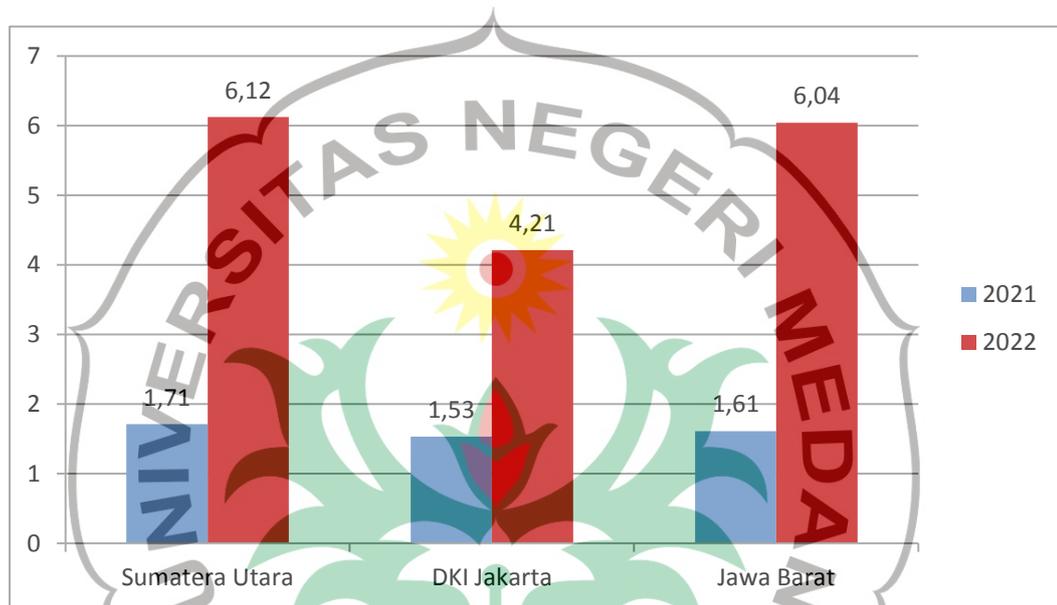
Pada tahun 2005 tingkat inflasi sangat tinggi yaitu sebesar 22,41 ini adalah inflasi tertinggi pasca krisis moneter (1997/1998), tahun 2005 adalah tahun awal pemerintahan kabinet SBY yang membuat kebijakan untuk menaikkan harga BBM sampai 100%, yang dipicu secara eksternal yakni adanya kenaikan harga minyak mentah internasional menjadi lebih tinggi, hal ini menyebabkan pemerintah berusaha untuk menghapuskan subsidi BBM akibatnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari meningkat tajam, sekaligus semua barang dan jasa

yang ada di pasar mengalami kenaikan yang cukup besar. Namun pada tahun 2006 mengalami penyesuaian, dan angka inflasi kembali menuju pada angka yang lebih moderat dan sesuai dengan yang ditargetkan secara nasional (Laporan Perekonomian, 2005).

Pada tahun 2008 inflasi mencapai 10,72% naik sebesar 4,12% bila dibandingkan dengan tahun 2007 hal ini dipengaruhi oleh krisis keuangan global, juga dipengaruhi oleh inflasi harga yang diatur pemerintah dan bahan makanan yang bergejolak. Kondisi ini memukul berat perekonomian Indonesia, termasuk perekonomian Sumatera Utara (Laporan Perekonomian, 2008). Tahun 2009 inflasi mengalami penurunan terendah sepanjang sejarah pada saat itu, berada jauh dibawah batas target, hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya prospek pemulihan ekonomi global (Laporan Perekonomian, 2009).

Pada tahun 2013 kembali terjadi tingkat inflasi yang tinggi, jauh di atas tahun 2011 dan 2012 yang masih 3,67% dan 3,86%. Inflasi Sumut di tahun 2013 itu lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 8,38% hal ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan dimana peranannya besar karena diakhir tahun menghadapi natal dan tahun baru (Laporan Perekonomian, 2013). Tapi secara umum itu bisa terkontrol dengan baik dan ditahun berikutnya inflasi terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022 inflasi kembali naik yaitu sebesar 6,12% yang disebabkan oleh kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau (Laporan Perekonomian, 2022).

Berikut ini akan dijelaskan perbandingan tingkat inflasi antara Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2021-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Gambar 1.2 Perbandingan Tingkat Inflasi Di Berbagai Provinsi (%)

Pada gambar 1.2 menunjukkan perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Jawa Barat pada tahun 2021 dan 2022, pada gambar terlihat bahwa tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Tahun 2021 inflasi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,53% dan Jawa Barat sebesar 1,61%, sedangkan di Sumatera Utara yaitu sebesar 1,71%. Tahun 2022 tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 6,12% masih lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta yaitu 4,12% dan Jawa Barat sebesar 6,04%.

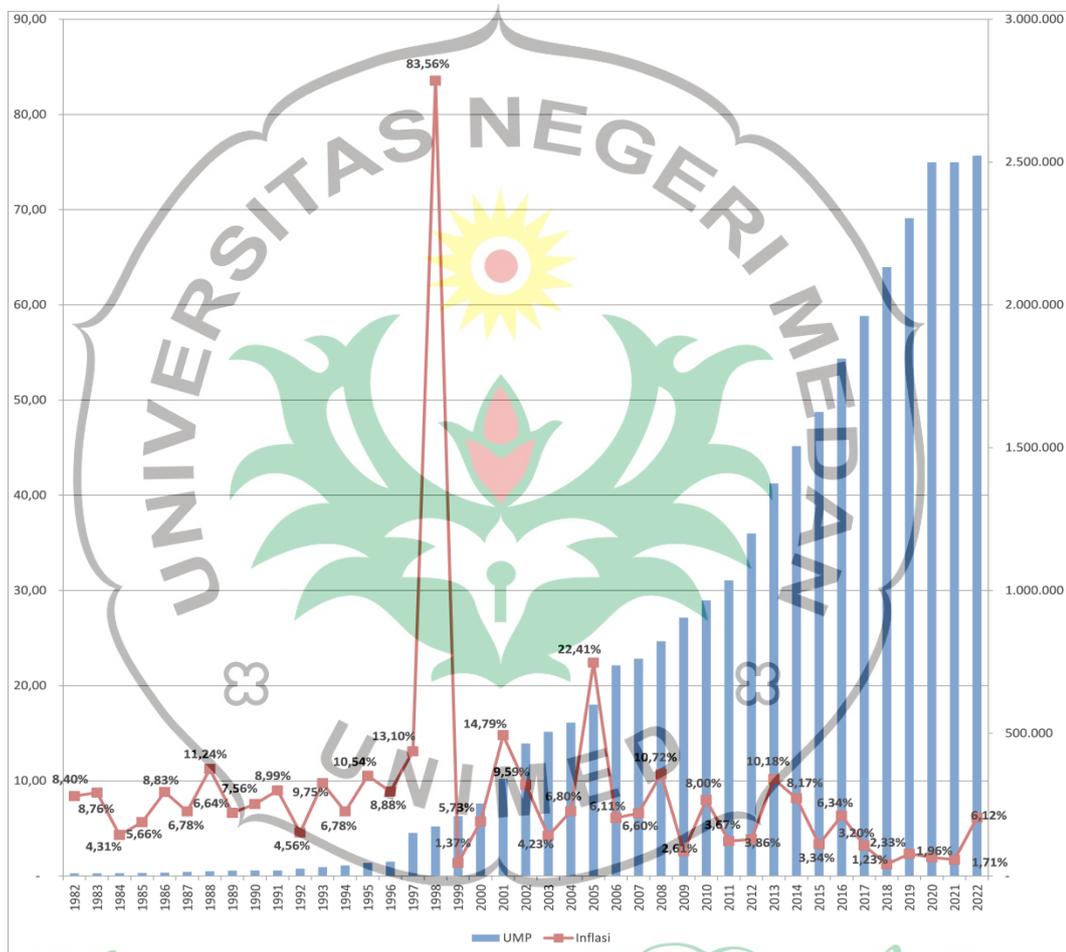
Inflasi di Sumatera Utara mengalami tren fluktuasi atau naik turun dan belum menunjukkan tren yang belum stabil. Tingkat inflasi di Sumatera Utara rata-rata presentase angkanya masih lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa inflasi masih bermasalah di Sumatera Utara dan perlu dilakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

Menurut (Priyono dan Candra, 2016) teori hipotesis pendapatan relatif (*Relatif Income Hypotesis*) dikemukakan oleh James Dusenberry pada tahun 1949, menyatakan bahwa konsumsi tergantung pada pendapatan yang tertinggi yang pernah dicapai. Apabila terjadi kenaikan upah maka pengeluaran konsumsi akan cenderung meningkat dan permintaan akan barang atau jasa juga akan naik, pada akhirnya secara tidak langsung akan membuat kenaikan harga-harga di pasaran. Hal ini diasumsikan bahwa ketika seseorang memperoleh upah yang lebih besar, maka seseorang tersebut akan menggunakan upahnya untuk membeli kebutuhan secara berlebih, sehingga ketika upah naik maka inflasi juga akan meningkat. Peningkatan Upah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup pekerja, tetapi disisi lain menjadi tantangan dikarenakan dapat mengakibatkan peningkatan laju inflasi. Dengan demikian salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi yaitu besarnya upah minimum. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP).

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023) Upah minimum adalah upah terendah termasuk tunjangan teratur tetapi tidak termasuk upah lembur yang dibayarkan kepada karyawan (per jenis jabatan/pekerjaan). Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu Provinsi. Upah minimum ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di suatu daerah dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi, sehingga upah minimum antar daerah berbeda-beda.

Berikut ini akan dijelaskan perkembangan UMP Sumatera Utara dari tahun 1982-2022 menurut data dari Badan Statistik (BPS) Sumatera Utara.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.3 UMP Sumatera Utara Tahun 1982-2022 (Rupiah)

Pada gambar 1.3 menunjukkan tingkat UMP Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan secara terus-menerus, mengalami tren yang terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 1982 UMP berada di angka terendah yaitu sebesar 9.350 ribu rupiah dan pada tahun 2022 UMP berada di angka tertinggi yaitu sebesar 25.226.100 ribu rupiah. Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya disebabkan

oleh nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang selalu mengalami peningkatan, dan harga barang-barang kebutuhan hidup cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu (Laporan Perekonomian, 2009).

Pada tahun 2005 dan 2006 UMP Sumatera Utara mengalami kenaikan. Sedangkan inflasi Sumatera Utara mengalami penurunan drastis yaitu dari 22,41% menjadi 6,11%. Tahun 2005 laju inflasi naik mencapai 22,41%. Melonjaknya laju inflasi tersebut diakibatkan meningkatnya harga barang-barang yang cukup tinggi sebagai dampak baik langsung maupun tidak langsung dari kenaikan harga BBM. Namun pada tahun 2006 mengalami pemulihan dan penyesuaian, angka inflasi turun kembali menuju pada angka yang lebih stabil dan sesuai dengan yang ditargetkan secara nasional. Penurunan laju inflasi pada tahun 2006 dikarenakan terjaganya kondisi pasokan dan distribusi barang selama tahun 2006 (Laporan Perekonomian, 2006).

Pada tahun 2006 UMP naik tetapi tingkat inflasi turun, hal ini dikarenakan dengan kondisi buruh yang menginginkan UMP tahun 2006 naik. Meskipun inflasi turun, kenaikan upah dapat terjadi karena adanya tekanan dari serikat pekerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dalam kondisi yang stabil, perusahaan lebih mampu menaikkan upah karena pendapatan dan keuntungan mereka tumbuh. Jika inflasi turun ini berarti dapat memberikan ruang bagi kenaikan upah tanpa mengalami tekanan inflasi yang signifikan (Laporan Perekonomian, 2006).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa UMP mengalami tren yang terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan inflasi berfluktuasi bahkan mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup drastis. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori. Ketidaksesuaian hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang perlu dikaji ulang.

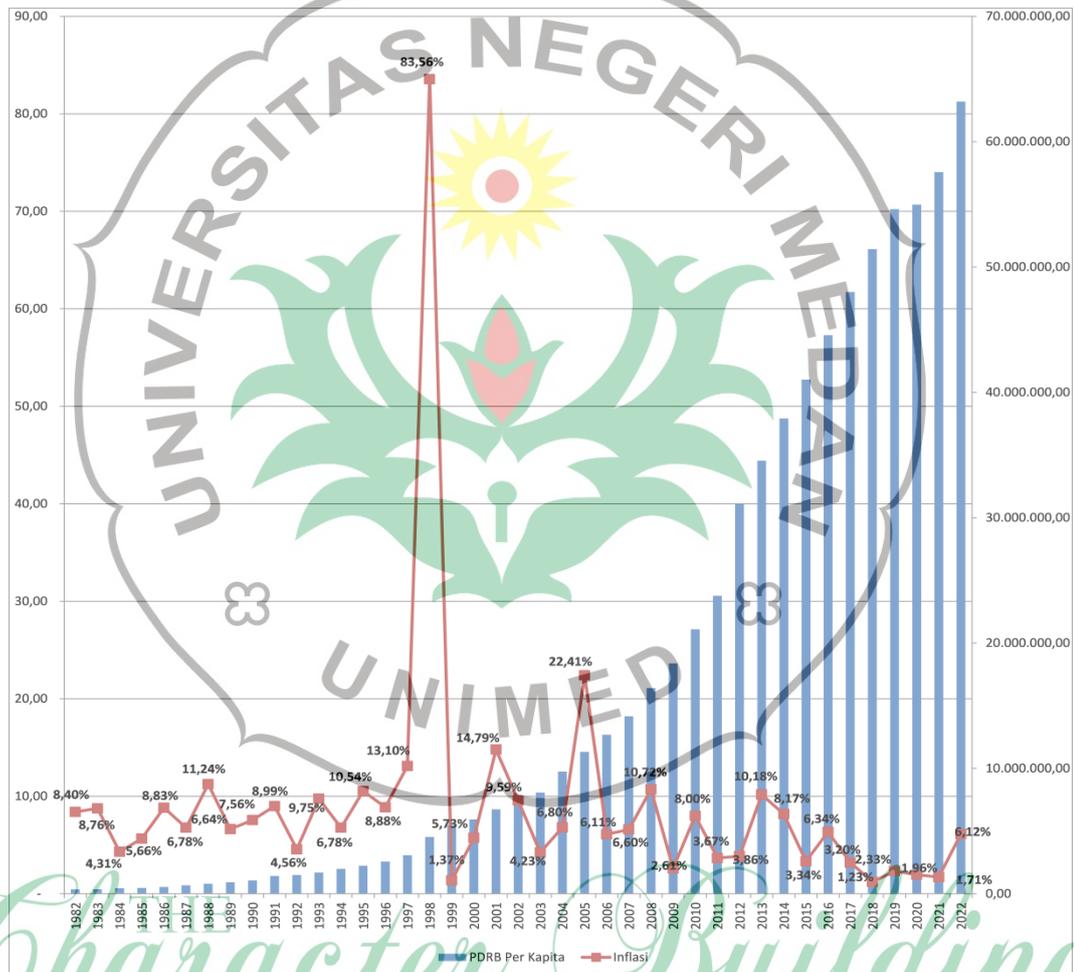
Penetapan tingkat upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah dapat mendorong peningkatan laju inflasi seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siswoyo & Asrini, 2020) yang menyatakan Upah Minimum Provinsi UMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pergerakan inflasi. Inflasi terjadi ketika upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kenyataannya kenaikan UMP dapat menyebabkan kenaikan tingkat inflasi. Tetapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan (Widiyanto & Utomo, 2023) yang menyatakan tidak ada hubungan kausalitas antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan tingkat inflasi. Upah minimum provinsi tidak termasuk salah satu determinan inflasi. Serta Inflasi juga tidak menyebabkan Upah Minimum Provinsi memperlihatkan inflasi tidak atau kurang diperhitungkan dalam kebijakan penentuan upah minimum provinsi.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi inflasi yaitu PDRB Per Kapita. Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, dan menyoroti aspek lain dari inflasi (Boediono, 1998). Teori Keynes menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi seperti PDRB per kapita. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan

ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rejeki diantara kelompok – kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut *inflationary gap*). Kondisi ini bisa terjadi apabila pendapatan perkapita meningkat, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat, dan akibatnya akan terjadi tambahan permintaan terhadap barang. Tambahan permintaan oleh masyarakat, jika tidak diimbangi oleh tambahan penawaran akan berakibat harga barang-barang akan naik, sehingga keadaan ini akan berakibat timbulnya inflasi.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023) PDRB per kapita atau Pendapatan Regional Perkapita adalah pendapatan regional yang dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah atau daerah, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan ekonomi yang menunjukkan semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin sejahtera penduduk yang berada di wilayah tersebut. Kenaikan pendapatan perkapita merupakan pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat tetapi dengan adanya kenaikan pendapatan perkapita juga menjadi tantangan yaitu apabila pendapatan perkapita meningkat akan menyebabkan inflasi.

Berikut ini akan dijelaskan perkembangan PDRB Per Kapita Sumatera Utara atas harga berlaku dari tahun 1982-2022 menurut data dari Badan Statistik (BPS) Sumatera Utara.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.4 PDRB Per Kapita Sumatera Utara Tahun 2001-2022 (Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.4 mengidentifikasi bahwa PDRB per kapita di Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1982 PDRB per kapita berada di angka terendah yaitu sebesar 350.000 rupiah dan PDRB per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 63.194.182,91 rupiah. PDRB per kapita di Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap

tahunnya disebabkan produktifitas terus meningkat. Pencapaian PDRB per kapita dianggap masih baik karena produktifitas yang dicapai masih lebih baik dari ambang batas (Laporan Perekonomian, 2009).

Pada tahun 2008 dan 2009 PDRB per kapita mengalami kenaikan. Sedangkan tingkat inflasi mengalami penurunan yaitu dari 10,72% menjadi 2,61%. Tahun 2008 tingkat inflasi naik karena dipengaruhi oleh krisis keuangan global dan harga bahan makanan yang bergejolak (Laporan Perekonomian, 2008). Pada tahun 2009 tingkat inflasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh turunnya harga BBM, pasokan LPG yang mulai lancar mendorong stabilnya harga, efektifnya program konversi minyak tanah ke gas dan turunnya harga komoditas pangan global sebagai ekses bergejolaknya perekonomian global serta tercukupinya kebutuhan beras nasional (Laporan Perekonomian, 2009).

Pada tahun 2011 PDRB per kapita mengalami kenaikan sedangkan inflasi mengalami penurunan yaitu dari 8% menjadi 3,67% disebabkan oleh harga bahan-bahan kebutuhan pokok makanan stabil. Rendahnya inflasi bahan pangan didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi serta stabilitas harga pangan. Cukup terkendalnya inflasi didukung oleh harga komoditi global yang terkoreksi cukup tajam, nilai tukar yang cenderung stabil dan ekspektasi inflasi yang terus membaik (Laporan Perekonomian, 2011).

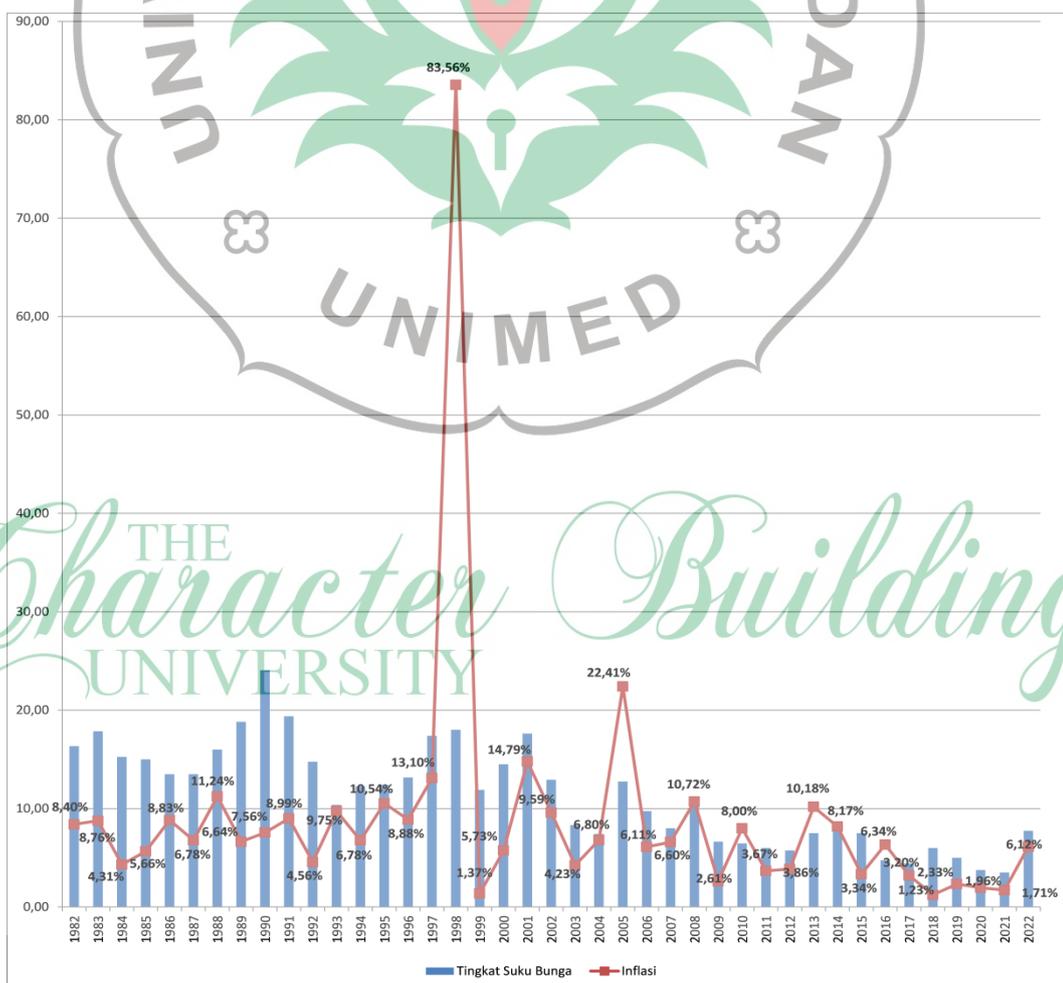
Keadaan tersebut menggambarkan bahwa tingkat PDRB per kapita di Sumatera Utara mengalami kenaikan secara terus menerus, sedangkan inflasi

menunjukkan tren fluktuasi. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Ketidaksesuaian hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang perlu dikaji ulang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2017) menyatakan bahwa PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi. Artinya, jika PDRB per kapita meningkat maka tingkat inflasi juga meningkat. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan (Lestari et al., 2022) menyatakan bahwa variabel PDRB Perkapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi. Ketika pendapatan naik maka tingkat inflasi akan turun. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dapat mengendalikan dan menjaga laju inflasi tetap rendah dan stabil.

Menurut (Mankiw, 2006) hubungan antara suku bunga dan inflasi tercermin pada teori persamaan Fisher atau efek Fisher. Teori persamaan Fisher adalah penyesuaian satu-satu dari suku bunga nominal terhadap inflasi. Menurut teori ini suku bunga nominal memiliki hubungan one for one dengan ekspektasi inflasi. Naiknya suku bunga menyulitkan para pengusaha untuk bergerak yang akhirnya akan menekan harga atau terjadinya inflasi, karena mereka harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman mereka. Kenaikan suku bunga menyulitkan para pengusaha karena mereka harus mengeluarkan tambahan biaya akibat kenaikan bunga, dan otomatis harga barang yang dijual akan mengalami peningkatan. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka kenaikan suku bunga dapat memicu kenaikan inflasi.

Menurut (Bank Indonesia, 2016) menjabarkan suku bunga adalah jumlah yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk penggunaan uang atau aset. Suku bunga biasanya dinyatakan dalam persentase dari pokok utang yang dibayarkan dalam periode tertentu. Tingkat suku bunga dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang dan disediakan hanya untuk kredit yang tidak diprioritaskan. Berikut ini akan dijelaskan perkembangan tingkat suku bunga Sumatera Utara dari tahun 1982-2022, data yang dipakai adalah tingkat suku bunga nominal yaitu BI rate dan data bersumber dari Bank Indonesia.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 1.5 Tingkat Suku Bunga Sumatera Utara (%)

Berdasarkan gambar 1.5 tersebut mengindikasikan suku bunga dan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara mengalami tren fluktuasi. Perkembangan suku bunga selalu berfluktuasi karena berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu kebijakan moneter dan pasar keuangan global.

Suku bunga di Sumatera Utara pada tahun 2007 mengalami penurunan dari 9,75% menjadi 8,00%. Sedangkan inflasi mengalami kenaikan di tahun 2007 yaitu dari 6,11% menjadi 6,60%. Inflasi tersebut dikarenakan adanya peningkatan harga kebutuhan pokok (Laporan Perekonomian, 2007). Suku bunga Sumatera Utara pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu dari 7,50% menjadi 5,75%. Di tahun yang sama inflasi mengalami kenaikan dari 3,34% menjadi 6,34%. Inflasi tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan harga indeks kelompok pengeluaran seperti bahan makanan, tembakau, air, listrik, bahan bakar (Laporan Perekonomian, 2016).

Kondisi tersebut mencerminkan suku bunga mengalami penurunan dan inflasi mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi karena saat suku bunga mengalami penurunan akan mengakibatkan kecepatan perputaran uang. Uang yang beredar dimasyarakat mengalami peningkatan, karena masyarakat cenderung lebih banyak meminjam uang di bank saat suku bunga rendah. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan membuat permintaan barang dan jasa meningkat.

Tren suku bunga dan inflasi sama-sama cenderung berfluktuasi di Sumatera Utara, berdasarkan tahun 2007 dan 2016 memperlihatkan ketika suku bunga

mengalami penurunan, namun inflasi naik. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan teori. Ketidaksesuaian hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang perlu dikaji ulang.

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Amaliya, 2010) menyatakan suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Kenaikan suku bunga akan mengakibatkan kenaikan harga output barang dan jasa secara keseluruhan atau dapat menyebabkan inflasi. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan (Rasyidin et al., 2022) menyatakan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat inflasi. Suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Pengaruh negatif disini dapat diartikan jika suku bunga meningkat, inflasi menurun. Disisi lain, apabila tingkat bunga menurun menyebabkan inflasi menjadi meningkat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai teori hipotesis pendapatan relatif (*Relatif Income Hipotesis*) dikemukakan oleh James Dusenberry (1949) yang mengatakan dalam jangka pendek konsumsi berubah dalam proporsi yang lebih kecil dari perubahan pendapatan. Dalam jangka pendek apabila pendapatan menurun maka pengeluaran konsumsi juga akan menurun tetapi proporsinya lebih kecil tidak sebanding dengan turunnya pendapatan. Apabila terjadi kenaikan pendapatan maka pengeluaran konsumsi akan cenderung meningkat dengan proporsi sangat kecil, maka tidak terjadi kenaikan permintaan dan kenaikan harga secara signifikan. Jadi pada jangka pendek tidak akan berdampak signifikan menimbulkan inflasi. Sedangkan dalam jangka panjang konsumsi berubah secara proporsional dengan pendapatan, dalam jangka panjang apabila dari tahun ke

tahun terdapat kenaikan penghasilan bagi seluruh masyarakat, maka distribusi penghasilan seluruh masyarakat tidak mengalami perubahan, kenaikan penghasilan absolute menyebabkan pengeluaran konsumsi juga akan naik dalam proporsi yang sama. Dengan naiknya pengeluaran konsumsi maka permintaan akan barang dan jasa juga akan naik, secara tidak langsung akan membuat kenaikan harga-harga. Sehingga ketika upah naik maka inflasi juga akan naik (Priyono & Candra, 2016).

Menurut (Simanungkalit, 2020) model Keynesian menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi seperti PDRB per kapita. Banyak faktor yang mendorong tingkat inflasi dan tingkat output dalam jangka pendek. Kurva jangka pendek Agregat Demand menunjukkan hubungan yang positif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk jangka pendek. Dalam jangka pendek peningkatan kenaikan permintaan akan meningkatkan output dan tingkat harga karena kecenderungan perusahaan untuk berekspansi ke depan. Kenaikan tingkat harga bisa saja menyebabkan inflasi naik dari tingkat inflasi periode sebelumnya. Artinya menurut pandangan keynesian dalam jangka pendek ketika tingkat pendapatan perkapita naik dan tingkat harga juga naik. Sedangkan model Keynesian dalam jangka panjang permintaan agregat yang disebabkan peningkatan pendapatan per kapita akan menentukan nilai nominal output yang merupakan produk dari tingkat harga dan jumlah output yang diminta, dan tidak akan menaikkan tingkat harga karena perusahaan cenderung untuk menyesuaikan outputnya dari pada merubah harga produknya, sehingga tidak akan menimbulkan inflasi (Silasa, 2016).

Menurut (Mankiw, 2006) teori persamaan Fisher atau efek Fisher dalam jangka pendek naiknya suku bunga mengakibatkan sektor riil sulit bergerak yang akhirnya akan menekan harga atau terjadinya inflasi. Kenaikan suku bunga menyulitkan para pengusaha karena mereka harus mengeluarkan tambahan biaya akibat kenaikan bunga, dan otomatis harga barang yang dijual oleh pengusaha akan mengalami peningkatan, maka kenaikan suku bunga dapat memicu kenaikan inflasi. Sedangkan menurut teori preferensi likuiditas oleh Keynes, menjelaskan hubungan antara suku bunga dan inflasi dalam jangka panjang menyatakan bahwa peningkatan suku bunga akan berpotensi mendorong inflasi pada tingkat yang lebih stabil. Menurut teori ini suku bunga akan berpengaruh pada kesediaan orang untuk menabung. Kenaikan suku bunga akan menarik minat masyarakat untuk lebih banyak menyimpan dananya di bank, masyarakat lebih mau menabungkan uangnya daripada membelanjakan uangnya. Permintaan barang dan jasa akan menurun yang pada akhirnya tidak menimbulkan inflasi.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan terdapat perbedaan hubungan dalam jangka pendek dan jangka panjang antara variabel X yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan tingkat suku bunga terhadap variabel Y yaitu inflasi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah perbedaan hubungan dalam jangka pendek dan jangka panjang antar variabel adalah dengan menggunakan model koreksi kesalahan atau *Error Correction Model* (ECM).

Penelitian ini memanfaatkan model *Error Correction Model* (ECM) yang telah melalui serangkaian uji statistik seperti uji derajat integrasi, uji Engle-

Granger (EG), serta uji kointegrasi, yang nantinya hasil-hasil uji tersebut menunjukkan model ECM dapat digunakan dan layak untuk menganalisis hubungan antar variabel-variabel penelitian dalam jangka pendek dan jangka panjang, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan dan ketidaknormalan dalam data serta karakteristik ketidakstasioneran.

Error Correction Model (ECM) adalah model yang digunakan untuk menyesuaikan persamaan regresi antara variabel-variabel yang pada dasarnya bersifat *non-stasioner* secara individual sehingga dapat kembali kepada nilai keseimbangannya dalam jangka panjang. Pendekatan ini membantu dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dalam kedua jangka waktu tersebut, terutama ketika ada ketidakseimbangan dan ketidaknormalan dalam model serta ketidakstasioner dalam data. Penggunaan model ECM dalam penelitian ini penting karena adanya kekhawatiran akan ketidaksesuaian antara jangka pendek dan jangka panjang dalam hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP), PDRB per kapita dan tingkat suku bunga terhadap inflasi. Melalui model ECM, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), PDRB Per Kapita dan Tingkat Suku Bunga terhadap Inflasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut beberapa topik masalah tersebut:

1. UMP mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan inflasi berfluktuasi bahkan mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup drastis. Seperti pada tahun 2005 dan 2006 UMP Sumatera Utara mengalami kenaikan, sedangkan Inflasi Sumatera Utara mengalami penurunan drastis yaitu dari 22,41% menjadi 6,11%.
2. PDRB Per Kapita di Sumatera Utara mengalami kenaikan secara terus menerus, sedangkan inflasi menunjukkan tren fluktuasi. Contohnya seperti pada tahun 2008-2011 PDRB Per Kapita Sumatera Utara mengalami kenaikan, sedangkan tingkat inflasi Sumatera Utara pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan yaitu dari 10,72% menjadi 2,61%. Pada 2010 dan 2011 inflasi juga mengalami penurunan dari 8,00% menjadi 3,67%.
3. Tren tingkat suku bunga dengan inflasi sama-sama cenderung berfluktuasi di Sumatera Utara, pada tahun 2007 dan 2016 memperlihatkan tren suku bunga turun dan inflasi naik. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan teori.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah di paparkan sebelumnya agar penelitian ini berfokus pada topik pembahasan supaya tidak terjadi perluasan pembahasan, maka peneliti membatasi variabel yang akan digunakan yaitu:

1. Penelitian menggunakan variabel dependen inflasi di Provinsi Sumatera Utara 1982-2022.

2. Variabel independen penelitian ini yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, dan Tingkat Suku Bunga di Provinsi Sumatera Utara 1982-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah UMP berpengaruh terhadap tingkat Inflasi di Sumatera Utara pada jangka pendek dan jangka panjang?
2. Apakah PDRB Per Kapita berpengaruh terhadap tingkat Inflasi di Sumatera Utara pada jangka pendek dan jangka panjang?
3. Apakah Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap tingkat Inflasi di Sumatera Utara pada jangka pendek dan jangka panjang?
4. Apakah UMP, PDRB Per Kapita dan Tingkat Suku Bunga berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap tingkat Inflasi di Sumatera Utara pada jangka pendek dan jangka panjang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh UMP terhadap tingkat Inflasi di Sumatera Utara pada jangka pendek dan jangka panjang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB Per Kapita terhadap tingkat Inflasi di Sumatera Utara pada jangka pendek dan jangka panjang.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap tingkat Inflasi di Sumatera Utara pada jangka pendek dan jangka panjang.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh UMP, PDRB Per Kapita dan Tingkat Suku Bunga secara simultan atau secara bersama-sama terhadap tingkat Inflasi di Provinsi Sumatera Utara pada jangka pendek dan jangka panjang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini bisa memberikan kegunaan bagi semua orang terutama bagi penulis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Peneliti dapat lebih memahami serta bertambahnya ilmu dan wawasan terkait kajian yang diteliti.

2. Bagi Akademisi/Mahasiswa

Bagi mahasiswa/akademisi kajian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang luas serta bisa menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis. Kajian penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dari kajian yang sudah ada maupun penelitian yang akan dilakukan.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Fakultas Ekonomi serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas, sebagai referensi civitas akademik

Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa akan pentingnya peran pemerintah untuk menstabilkan tingkat inflasi.



THE *Character Building*
UNIVERSITY